

Pembangunanisme dan teknokratisme: Konstruksi wacana media lokal terhadap pembangunan infrastruktur di Bandar Lampung

Developmentalism and technocracy: The construction of local media discourse on infrastructure development in Bandar Lampung

David Prayoga^{1*}, Khairullah² & Nadya Amalia Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia *Penulis Korespondensi

Author's email:

¹daviddprg@gmail.com

Keywords:

*Critical discourse analysis,
developmentalism,
local media,
political legitimization,
technocracy*

Abstract: This study analyzes the discourse construction of the local Lampung media, Lampung Geh, in reporting the development of the cable car in Bandar Lampung during the period of February-June 2025. The study uses Teun A. van Dijk's critical discourse analysis model. This research examines four news articles focusing on text structure (macro, superstructure, micro), social cognition, and social context. The results show that the media consistently constructs the government as a visionary actor and foreign investors as saviors, while positioning the public passively. The study also reveals the dominant ideologies at work in the text: developmentalism, which naturalizes physical development as the sole indicator of progress while ignoring social and environmental factors, and technocracy, which depoliticizes development into technical-administrative issues, excluding public participation. Both of these ideologies work simultaneously to legitimize foreign capital involvement and to close off space for criticism of contract transparency, structural dependency risks, and locally based development alternatives. The media functions more as an instrument of political development legitimacy than as a critical public space. This research contributes to the study of development communication and promotes critical literacy among the public regarding local media discourse.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis konstruksi wacana media lokal Lampung Geh dalam pemberitaan pembangunan kereta gantung di Bandar Lampung periode Februari-Juni 2025. Penelitian menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Penelitian ini mengkaji empat berita dengan fokus pada struktur teks (makro, superstruktur, mikro), kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan media secara konsisten mengonstruksi pemerintah sebagai aktor visioner dan investor asing sebagai penyelamat, sementara masyarakat diposisikan pasif. Penelitian ini juga mengungkap ideologi dominan yang beroperasi dalam teks, yakni pembangunanisme yang menaturalkan pembangunan fisik sebagai satu-satunya indikator kemajuan dengan mengabaikan aspek sosial-lingkungan, dan teknokratisme yang mendepolitisasikan pembangunan menjadi persoalan teknis-administratif tanpa partisipasi publik. Kedua ideologi ini bekerja simultan untuk melegitimasi keterlibatan modal asing dan menutup ruang kritik terhadap transparansi kontrak, risiko ketergantungan struktural, serta alternatif pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Media berfungsi lebih sebagai instrumen legitimasi politik pembangunan daripada ruang publik kritis. Penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi pembangunan dan mendorong literasi kritis masyarakat terhadap wacana media lokal.

Kata kunci:

*Analisis wacana kritis,
konstruksi realitas, legitimasi
politik, media lokal,
pembangunanisme*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di daerah sering diposisikan sebagai simbol kemajuan dan prestise pemerintah. Media massa memainkan peran sentral dalam membingkai realitas pembangunan, baik sebagai ruang legitimasi maupun arena kritik public (Eriyanto, 2021). Proyek pembangunan kereta gantung di Bandar Lampung yang direncanakan sejak awal 2025 menjadi isu yang menarik perhatian media lokal, khususnya Lampung Geh.

Lampung Geh, sebagai media daring lokal yang fokus pada informasi positif tentang Lampung, secara konsisten memberitakan perkembangan proyek ini. Dari Februari hingga Juni 2025, terdapat empat berita utama yang membahas aspek berbeda: rencana pembangunan, kerja sama dengan investor China, skema pembiayaan non-APBD, hingga perubahan rute akibat kendala teknis. Pemberitaan ini tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk konstruksi realitas tertentu tentang pembangunan.

Penelitian ini penting karena media lokal memiliki kedekatan geografis dan psikologis dengan masyarakat, sehingga konstruksi wacana yang dibangun berpotensi membentuk kesadaran publik secara langsung. Nielsen (2015) menegaskan bahwa media lokal mempertahankan kedekatan geografis dan psikologis dengan audiens mereka, menjadikan pembingkaiannya isu yang mereka lakukan sangat berpengaruh dalam membentuk kesadaran publik dan identitas lokal. Dalam konteks Lampung Geh yang beroperasi di wilayah Lampung dan memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat setempat, konstruksi wacana tentang pembangunan kereta gantung tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi secara aktif membentuk bagaimana masyarakat Lampung memahami dan memaknai pembangunan infrastruktur di daerah mereka. Selain itu, proyek kereta

gantung melibatkan investor asing dengan skema pembiayaan yang menimbulkan pertanyaan kritis tentang transparansi, ketergantungan, dan prioritas pembangunan di tengah masalah infrastruktur dasar yang belum terselesaikan.

Sebagai provinsi mayoritas Muslim, tanggung jawab moral media menjadi lebih krusial dalam menyampaikan informasi secara amanah (jujur dan dapat dipercaya). Nilai-nilai komunikasi Islam—amanah (transparansi), *tabayyun* (verifikasi informasi), dan maslahah (kemaslahatan publik) seharusnya menjadi landasan etis media lokal dalam memberitakan pembangunan (Suryani et al., 2023; Yumni et al., 2024). Ketiadaan prinsip-prinsip ini berpotensi menciptakan informasi yang menyesatkan dan merugikan kepentingan masyarakat.

Penelitian tentang konstruksi wacana pembangunan infrastruktur oleh media juga telah dilakukan dengan berbagai fokus. Arifin & Basuki (2018) menganalisis pemberitaan media lokal di Yogyakarta tentang pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), menemukan bahwa media lokal cenderung membingkai proyek infrastruktur sebagai simbol modernitas dan kemajuan daerah dengan mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat yang tergusur. Nugroho (2020) mengungkap bahwa media nasional Indonesia cenderung mereproduksi narasi developmentalis pemerintah dalam pemberitaan proyek infrastruktur, dengan membingkai pembangunan sebagai pencapaian tanpa memberikan ruang memadai untuk diskusi dampak sosial dan transparansi di tingkat lokal. Lim (2021) menambahkan bahwa media massa Indonesia rentan terhadap kooptasi oleh kepentingan politik-ekonomi elite, sehingga pemberitaan pembangunan sering kali lebih melayani legitimasi kebijakan daripada fungsi pengawasan kritis. Hameleers (2021) menemukan

bahwa narasi "modernitas" dan "kemajuan" mendominasi pemberitaan infrastruktur, sementara perspektif kritis tentang ketergantungan ekonomi dan dampak lingkungan cenderung terpinggirkan. Namun, terdapat gap penelitian yang signifikan. Pertama, penelitian-penelitian di atas mayoritas fokus pada media nasional atau kasus individual, sementara kajian mendalam tentang media lokal dengan relasi patronase kuat terhadap pemerintah daerah masih minim. Meskipun [Arifin & Basuki \(2018\)](#) mengkaji media lokal Yogyakarta, fokus mereka pada NYIA belum mengungkap secara detail mekanisme relasi ekonomi media-pemerintah dan bagaimana ketergantungan finansial (iklan, sponsorship) membentuk konstruksi wacana. Kedua, meskipun [Nugroho \(2020\)](#) dan [Lim \(2021\)](#) mengidentifikasi bias developmentalis di media nasional, tetapi belum ada kajian spesifik tentang bagaimana media lokal—yang memiliki kedekatan geografis, ketergantungan ekonomi pada iklan pemerintah daerah, dan relasi patronase lebih kuat—mengonstruksi wacana pembangunan dengan bias yang berpotensi lebih intens. Ketiga, aspek keterlibatan investor asing dalam proyek infrastruktur daerah dan bagaimana media lokal membingkainya dalam konteks ideologi ganda (pembangunanisme-fisikalisme-globalisasi-teknokratisme) belum banyak dikaji secara kritis. Keempat, integrasi perspektif komunikasi Islam sebagai kerangka etis untuk mengevaluasi praktik jurnalisme pembangunan di daerah mayoritas Muslim belum pernah dilakukan dalam kajian wacana media lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada empat aspek utama. Pertama, fokus pada media lokal (Lampung Geh) yang memiliki kedekatan geografis dan relasi patronase struktural dengan pemerintah daerah. Media lokal memiliki

ketergantungan ekonomi lebih tinggi pada iklan pemerintah daerah dan akses informasi yang lebih terikat pada elite lokal dibandingkan media nasional sehingga berpotensi menghasilkan bias yang lebih kuat. Berbeda [Arifin & Basuki \(2018\)](#) yang fokus pada framing teks berita, penelitian ini mengungkap mekanisme relasi ekonomi dan patronase yang membentuk konstruksi wacana tersebut.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk untuk mengungkap bagaimana media lokal mengkonstruksi realitas pembangunan melalui strategi textual, kognisi sosial wartawan, dan konteks sosial politik-ekonomi yang melatarbelakangi produksi berita. [Van Dijk \(2018\)](#) menegaskan bahwa analisis wacana kritis tidak hanya mengkaji teks, tetapi juga praktik produksi wacana dan struktur kekuasaan yang membentuknya. Tujuan penelitian adalah mengungkap konstruksi wacana, ideologi yang tersembunyi, relasi patronase media-pemerintah, dan kepentingan yang dilayani melalui pemberitaan tersebut. Dengan mengungkap konstruksi wacana, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi diskusi mengenai pembangunan dalam perspektif kritis.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini berlandaskan pada analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) yang memandang bahasa tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi dan relasi kuasa ([Van Dijk, 2018](#)). Teun A. van Dijk mengembangkan model analisis yang mencakup tiga dimensi: struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Struktur teks terdiri dari struktur makro (tema), superstruktur (skema), dan struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistik, retoris). Kognisi sosial mengkaji bagaimana wartawan dan institusi media memproduksi teks berdasarkan skema mental mereka. Konteks sosial menghubungkan wacana dengan struktur

sosial, kekuasaan, dan akses (Wodak & Meyer, 2023).

Fairclough (2018) menegaskan bahwa CDA merupakan reasoning dialektis yang menghubungkan analisis tekstual dengan praktik sosial dan struktur kekuasaan. Dalam konteks media lokal, hal ini berarti mengkaji tidak hanya bagaimana teks disusun, tetapi juga bagaimana institusi media beroperasi dalam relasi kuasa dengan pemerintah daerah dan aktor ekonomi.

Dalam konteks pembangunan, ideologi pembangunanisme memandang pembangunan fisik sebagai ukuran utama kemajuan, sering mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Fiskalisme menekankan stabilitas keuangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Globalisasi ekonomi menormalkan ketergantungan pada modal asing sebagai solusi pembangunan. Teknokratisme meyakini setiap masalah dapat diselesaikan dengan solusi teknis tanpa partisipasi publik (Richardson, 2019).

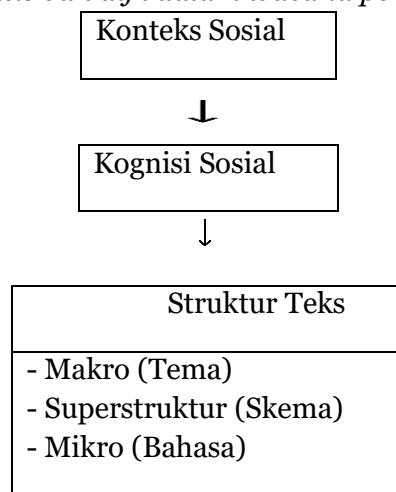
Penelitian ini menempatkan nilai-nilai komunikasi Islam sebagai kerangka etis untuk mengevaluasi praktik jurnalisme pembangunan di Lampung. Komunikasi Islam menekankan tiga prinsip fundamental dalam penyebaran informasi: Pertama, amanah (kejujuran dan tanggung jawab) mengharuskan media menyampaikan informasi secara akurat tanpa manipulasi atau keberpihakan yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks pemberitaan pembangunan, prinsip amanah menuntut transparansi

penuh tentang skema pembiayaan, kontrak dengan investor asing, dan potensi risiko proyek, bukan hanya menonjolkan aspek positifnya. Kedua, *tabayyun* (verifikasi informasi) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 mengharuskan media untuk memverifikasi setiap informasi dari berbagai sumber sebelum disebarluaskan. Prinsip ini menuntut wartawan tidak hanya mengandalkan press release pemerintah, tetapi juga menggali perspektif masyarakat, ahli independen, dan kelompok kritis.

Ketiga, *maslahah* (kemaslahatan publik) menekankan bahwa tujuan komunikasi adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu. Media yang menjalankan prinsip maslahah akan mengutamakan informasi yang memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat, bukan sekadar melegitimasi kebijakan penguasa. Ketiga prinsip ini menjadi standar normatif untuk mengkaji apakah Lampung Geh, sebagai media lokal di daerah mayoritas Muslim, telah menjalankan fungsi komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau justru terjebak dalam pola jurnalisme yang melayani kepentingan elite politik-ekonomi. Haryatmoko (2019) menambahkan bahwa analisis wacana kritis dalam konteks Indonesia perlu memperhatikan dimensi kuasa lokal dan dinamika media daerah yang sering terjebak dalam relasi patronase dengan pemerintah lokal. Hal ini relevan dengan fokus penelitian ini pada media lokal Lampung.

Gambar 1

Kerangka analisis wacana kritis van dijk dalam wacana pemberitaan kereta gantung



Sumber: van Dijk (2018)

Penelitian ini juga mengacu pada konsep hegemoni Gramsci yang menjelaskan bagaimana dominasi dikonstruksi melalui konsensus, bukan kekerasan, di mana media berperan menyebarkan ideologi dominan. Dengan kerangka teoritis ini, penelitian menganalisis bagaimana Lampung Geh mengkonstruksi realitas pembangunan kereta gantung yang menguntungkan pemerintah dan investor, sambil menutup ruang kritik publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Objek penelitian adalah empat berita tentang pembangunan kereta gantung di Bandar Lampung yang dipublikasikan Lampung Geh melalui platform Kumparan pada 17 Februari, 22 Mei, 4 Juni, dan 24 Juni 2025. Keempat berita dipilih karena merepresentasikan tahapan dan aspek berbeda dari proyek: rencana awal, kerjasama investor, legitimasi fiskal, dan adaptasi teknis.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan mengunduh dan menyimpan teks berita lengkap beserta metadata (judul, tanggal, penulis, URL).

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi elemen wacana pada tiga level. Pertama, struktur teks mencakup tema, skema, semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Kedua, kognisi sosial mengkaji kerangka berpikir wartawan dan kebijakan redaksional. Ketiga, konteks sosial menghubungkan wacana dengan situasi politik-ekonomi yang melatarbelakangi (Hart et al., 2020).

Proses analisis dimulai dengan membaca berulang setiap berita untuk memahami tema besar, kemudian mengidentifikasi struktur skematik (*lead*, isi, penutup), dilanjutkan dengan analisis pilihan kata, struktur kalimat, dan perangkat retoris. Tahap berikutnya adalah menafsirkan bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk konstruksi realitas tertentu, kemudian menghubungkannya dengan konteks sosial-politik pembangunan di Bandar Lampung.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi teori dengan membandingkan temuan dengan penelitian sejenis, serta *member checking* dengan mendiskusikan interpretasi bersama pembimbing. Keterbatasan penelitian adalah fokus pada empat berita dari satu media, sehingga tidak merepresentasikan seluruh

konstruksi media lokal Lampung. Namun, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang pola konstruksi wacana yang dapat menjadi basis penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Wacana pada Level Teks

Analisis terhadap empat berita menunjukkan pola konstruksi yang konsisten. Pada level struktur makro, tema besar yang dibangun adalah legitimasi pembangunan infrastruktur sebagai simbol kemajuan kota. Berita pertama (17 Februari 2025) bertema "pembangunan sebagai simbol kemajuan," berita kedua (22 Mei 2025) menekankan "kerja sama internasional sebagai solusi," berita ketiga

(4 Juni 2025) fokus pada "legitimasi fiskal," dan berita keempat (24 Juni 2025) membingkai "adaptasi teknis sebagai peluang."

Pada level superstruktur, keempat berita mengikuti pola piramida terbalik dengan *lead* yang menonjolkan peran pemerintah, isi yang menjelaskan manfaat proyek, dan penutup yang meneguhkan optimisme. Tidak ada ruang bagi suara kritis atau perspektif alternatif. Struktur ini mengarahkan pembaca pada kesimpulan tunggal: pembangunan kereta gantung adalah langkah maju yang patut didukung.

Pada level struktur mikro, ditemukan beberapa strategi wacana yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Strategi wacana pada level mikro

Elemen	Strategi	Contoh	Fungsi Ideologis
Semantik	Penekanan manfaat, penyembunyian risiko	"mendorong pariwisata," "tidak membebani APBD"	Legitimasi pembangunan, penutupan ruang kritik
Sintaksis	Kalimat aktif untuk pemerintah, pasif untuk kendala	"Pemkot menggandeng investor," "Rute diubah"	Peneguhan agensi pemerintah, pengaburan tanggung jawab
Stilistik	Diksi positif dan progresif	"visioner," "solusi terbaik," "peluang baru"	Pembentukan citra positif pemerintah
Retoris	Klaim afirmatif tanpa bukti empiris	"diharapkan dapat," "akan tetap lancar"	Pembentukan kepastian semu

Sumber: analisis penelitian, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa keempat elemen ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menguatkan untuk menciptakan narasi tunggal yang menguntungkan pemerintah. Semantik wacana secara selektif menonjolkan aspek positif sambil menyembunyikan problematika. Frasa "tidak membebani APBD" diulang sebagai retorika

menenangkan, padahal absennya dana daerah tidak meniadakan risiko ketergantungan pada investor asing.

Semantik wacana secara selektif menonjolkan aspek positif sambil menyembunyikan problematika. Frasa "tidak membebani APBD" diulang sebagai retorika menenangkan, padahal absennya dana daerah tidak meniadakan risiko

ketergantungan pada investor asing. Sintaksis menempatkan pemerintah sebagai subjek aktif ("menggandeng," "membangun"), sementara kendala teknis menggunakan konstruksi pasif ("diubah"), sehingga tanggung jawab atas kelemahan perencanaan tidak jelas.

Stilistik menggunakan leksikon yang bernuansa optimis: "visioner," "progresif," "harmonis," "solutif." Tidak ditemukan diksi kritis seperti "ketergantungan," "risiko," atau "transparansi." Pilihan kata ini bukan netral, melainkan strategi untuk membentuk persepsi publik bahwa pembangunan selalu positif (Machin & Mayr, 2021). Retoris menggunakan klaim afirmatif seperti "diharapkan dapat mendorong pariwisata" tanpa data pendukung, berfungsi sebagai janji implisit yang menenangkan sekaligus mengunci narasi pada satu kemungkinan: keberhasilan.

Strategi diskursif yang ditemukan dalam penelitian ini mirip dengan Oktavia & Nasution (2023) dalam analisis iklan Ramadhan, di mana simbol-simbol tertentu (dalam konteks mereka adalah simbol religius, dalam konteks penelitian ini adalah simbol kemajuan dan modernitas) digunakan untuk membentuk makna yang menguntungkan produsen wacana, sambil menyembunyikan kepentingan komersial atau politik di baliknya.

Kognisi Sosial: Kerangka Berpikir Wartawan dan Media

Pada level kognisi sosial, analisis menunjukkan wartawan Lampung Geh mengadopsi kerangka berpikir pemerintah yang memandang pembangunan infrastruktur sebagai solusi utama persoalan kota. Skema kognitif yang bekerja adalah sebagai berikut.

Pembangunan fisik = kemajuan
Investor asing = penyelamat
Masyarakat = penerima manfaat pasif.

Pada level kognisi sosial, analisis menunjukkan wartawan Lampung Geh mengadopsi kerangka berpikir pemerintah yang memandang pembangunan infrastruktur sebagai solusi utama persoalan kota. Media lokal seperti Lampung Geh memiliki kedekatan struktural dengan pemerintah daerah, baik melalui akses informasi maupun ketergantungan ekonomi. Lampung Geh dikenal memiliki akses istimewa ke pemerintah Provinsi Lampung—mendapat informasi langsung dari pejabat, ruang khusus untuk promosi program pembangunan, serta pendanaan dari iklan dan sponsorship pemerintah. Contohnya, peliputan intensif program percepatan penurunan stunting dan Visi Digital Lampung yang meraih peringkat nasional, di mana media ini diberi akses eksklusif untuk memproduksi konten positif sejalan dengan agenda pemerintah (Yuliana, 2025). Kedekatan ini mempengaruhi kebijakan redaksional yang cenderung menjadi "media sahabat pemerintah" daripada "media watchdog" (Nugroho, 2020), sehingga wartawan tidak diberi ruang—atau tidak merasa perlu—untuk menggali aspek problematis seperti transparansi kontrak, dampak sosial-lingkungan, atau suara masyarakat yang kritis.

Kognisi wartawan juga dibentuk oleh ideologi jurnalisme pembangunan (*development journalism*) yang populer di era Orde Baru (Adiprasetio, 2025), yang menekankan peran media sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Meskipun era reformasi menuntut jurnalisme kritis, praktik media lokal sering masih terjebak dalam pola lama (Lim, 2021). Lampung Geh, dengan visi menyajikan "konten positif tentang Lampung," secara struktural cenderung mengabaikan investigasi kritis.

Konteks Sosial: Relasi Kuasa dan Kepentingan Politik-Ekonomi

Pada level konteks sosial, konstruksi wacana tidak dapat dipisahkan dari struktur politik-ekonomi pembangunan di Bandar Lampung. Pemerintah kota memiliki kepentingan politik untuk membangun legitimasi melalui proyek prestisius, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Proyek kereta gantung berfungsi sebagai "politik pencitraan" yang menampilkan pemimpin daerah sebagai visioner dan berorientasi global.

Kepentingan ekonomi juga bekerja dalam dua aras. Pertama, pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal sehingga membutuhkan modal asing. Skema kerja sama dengan investor Tiongkok menawarkan solusi tanpa menguras APBD.

Namun, di balik itu, tersembunyi konsekuensi jangka panjang: pembagian keuntungan, hak pengelolaan, dan potensi ketergantungan. Kedua, investor asing memiliki kepentingan ekspansi ekonomi dan perluasan pengaruh, yang difasilitasi oleh pemerintah melalui kebijakan ramah investasi.

Konteks sosial juga menunjukkan ketimpangan akses wacana. Pemerintah dan investor memiliki akses dominan ke media, sementara masyarakat—terutama kelompok kritis yang mempertanyakan prioritas pembangunan—tidak diberi ruang. Dalam teori [van Dijk \(2018\)](#), disebut "kontrol simbolik," di mana kelompok dominan mengendalikan wacana publik untuk melanggengkan hegemoni.

Tabel 2

Konstruksi wacana pembangunan dalam empat berita

Berita	Realitas yang Dikonstruksi	Ideologi Dominan	Kepentingan yang Dilayani
Pemkot Akan Bangun Flyover dan Kereta Gantung	Pembangunan = kemajuan kota	Pembangunanisme	Legitimasi politik pemerintah
Pemkot Gandeng Investor China	Kerja sama internasional = harmonis dan setara	Globalisasi ekonomi	Kepentingan investor dan citra pemerintah
Kereta Gantung Dibiayai Investor, Bukan APBD	Pembangunan aman secara fiskal	Fiskalisme	Legitimasi fiskal pemerintah
Medan Sulit, Rute Diubah ke Batu Putu	Kendala teknis = peluang baru	Teknokratisme	Citra adaptif pemerintah

Sumber: analisis penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 2, terlihat jelas bahwa setiap berita memiliki fungsi ideologis spesifik yang saling melengkapi dalam membentuk narasi besar:

pembangunan kereta gantung adalah proyek visioner, aman secara fiskal, didukung investor internasional, dan mampu mengubah masalah menjadi

peluang. Konstruksi ini menutup ruang bagi wacana alternatif yang kritis.

Ideologi dalam Konstruksi Wacana

Analisis kritis mengungkap dua ideologi dominan yang bekerja secara simultan dalam konstruksi wacana pembangunan kereta gantung: pembangunanisme dan teknokratisme. Kedua ideologi ini saling memperkuat dan membentuk narasi hegemonik yang meminggirkan partisipasi publik dan perspektif kritis.

Pertama, ideologi pembangunanisme mendominasi keseluruhan pemberitaan dengan menganggap pembangunan fisik sebagai indikator utama kemajuan, mengabaikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Berita pertama secara eksplisit membangun narasi bahwa *flyover* dan kereta gantung adalah solusi kemacetan dan pendorong pariwisata, tanpa data empiris atau kajian menyeluruh dampak sosial-lingkungan. Konstruksi ini menciptakan asumsi bahwa pembangunan infrastruktur adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan daerah, sementara alternatif lain seperti peningkatan transportasi publik, pelestarian ruang hijau, atau pemberdayaan ekonomi lokal tidak pernah dihadirkan dalam wacana.

Pembangunanisme ini diperkuat dengan dua strategi diskursif pendukung. Pertama, normalisasi keterlibatan modal asing sebagai solusi pembangunan yang tidak terhindarkan. Diksi "menggandeng investor" mengkonstruksi relasi setara yang menyesatkan karena investor memiliki kuasa finansial yang jauh lebih besar dan dapat mendikte persyaratan kontrak yang menguntungkan mereka. Kedua, penekanan berulang pada narasi "tidak membebani APBD" sebagai justifikasi utama yang menyamarkan fakta bahwa absennya dana daerah tidak berarti tanpa konsekuensi—terutama terkait kontrak jangka panjang, bagi hasil yang

merugikan daerah, dan ketergantungan struktural pada modal asing yang dapat mengikis kedaulatan ekonomi lokal. Kedua strategi tersebut bekerja untuk melegitimasi skema pembiayaan asing tanpa memberikan ruang untuk mempertanyakan risiko dan alternatif pembiayaan lain.

Kedua, ideologi teknokratisme membingkai pembangunan sebagai persoalan teknis-administratif yang dapat diselesaikan oleh para ahli dan birokrat tanpa memerlukan partisipasi publik yang substantif. Berita keempat membingkai perubahan rute akibat "medan sulit" sebagai inovasi strategis yang menunjukkan fleksibilitas perencanaan, bukan sebagai indikasi kelemahan studi kelayakan awal atau kurangnya konsultasi dengan masyarakat lokal yang memahami kondisi geografis wilayah. Teknokratisme ini menciptakan ilusi bahwa keputusan pembangunan adalah ranah eksklusif teknokrat dan pemerintah, sehingga masyarakat hanya berposisi sebagai penerima manfaat pasif yang tidak perlu—bahkan tidak berhak—untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih jauh, teknokratisme ini melegitimasi absennya transparansi dan akuntabilitas publik. Tidak ada informasi mengenai mekanisme pengawasan publik terhadap kontrak dengan investor asing, tidak ada penjelasan tentang bagaimana masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan, dan tidak ada ruang untuk dialog kritis tentang dampak jangka panjang proyek. Wacana yang dibangun adalah bahwa "pemerintah dan ahli sudah mengurus semuanya," sehingga masyarakat cukup menunggu hasil tanpa perlu mempertanyakan proses. Teknokratisme dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme depolitisasi—mengubah isu politik dan etis (siapa yang diuntungkan? siapa yang dirugikan? bagaimana keadilan didistribusikan?) menjadi sekadar persoalan teknis (rute

mana yang paling efisien? Teknologi apa yang digunakan?).

Kolaborasi antara pembangunanisme dan teknokratisme ini menciptakan wacana hegemonik yang menutup ruang untuk wacana alternatif. Perspektif kritis yang mempertanyakan urgensi proyek, risiko ketergantungan pada modal asing, dampak lingkungan, transparansi kontrak, dan partisipasi masyarakat—semuanya absen dalam pemberitaan Lampung Geh. Media lokal, alih-alih menjalankan fungsi pengawasan kritis (*watchdog*), justru menjadi amplifier ideologi pembangunanisme-teknokratisme yang melayani kepentingan elite politik dan ekonomi (Krzyżanowski, 2020).

Evaluasi Pemberitaan Berdasarkan Prinsip Komunikasi Islam

Sebagai media lokal di daerah mayoritas Muslim, Lampung Geh memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan praktik jurnalisme yang sejalan dengan nilai-nilai komunikasi Islam. Namun, analisis terhadap empat berita menunjukkan gap signifikan antara praktik aktual dan prinsip normatif amanah, tabayyun, dan maslahah.

Pertama, pada prinsip *amanah*. Keempat berita hanya menonjolkan aspek positif proyek sambil menyembunyikan informasi krusial yang menjadi hak publik: identitas dan track record investor Tiongkok, detail kontrak bagi hasil "50:50", mekanisme pengawasan publik, hasil kajian AMDAL, dan proyeksi biaya maintenance jangka panjang. Berita keempat (24 Juni 2025) mengungkap kegagalan perencanaan awal (rute gagal karena "medan sulit"), tetapi dibingkai sebagai "inovasi strategis" dengan menekankan "view-nya bagus sekali"—ini adalah manipulasi informasi yang melanggar prinsip kejujuran.

Kedua, pada prinsip *tabayyun*. Keempat berita menunjukkan ketergantungan total pada sumber tunggal: pernyataan pemerintah. Tidak ada upaya verifikasi dari ahli transportasi, ekonomi pembangunan, aktivis lingkungan, warga terdampak, atau kelompok kritis. Pola press release journalism ini melanggar QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan pentingnya verifikasi multi-sumber sebelum menyebarkan informasi.

Ketiga, pada prinsip *maslahah*. Konstruksi wacana melayani kepentingan elite politik-ekonomi, bukan kepentingan publik luas. Media tidak menyajikan informasi yang memberdayakan publik untuk menilai prioritas pembangunan. Pertanyaan kritis seperti "Apakah kereta gantung lebih urgen daripada perbaikan drainase atau transportasi publik?" tidak pernah diajukan. Penekanan berulang pada frasa "tidak membebani APBD" berfungsi sebagai retorika penenang yang mengaburkan risiko jangka panjang ketergantungan pada modal asing.

Analisis ini mengungkap adanya jarak antara praktik aktual Lampung Geh dengan nilai-nilai ideal komunikasi Islam—*amanah*, *tabayyun*, dan *maslahah*. Temuan ini bukan dimaksudkan sebagai penghakiman, melainkan refleksi konstruktif yang dapat menjadi titik tolak perbaikan. Saat ini, pola liputan masih mencerminkan model jurnalisme pembangunan yang menekankan kemitraan dengan penguasa. Ke depan, dengan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip komunikasi Islam secara lebih konsisten, Lampung Geh memiliki peluang strategis untuk menjadi pelopor media lokal yang independen, kritis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik—sebuah transformasi yang sejalan dengan visi media ini untuk 'membuat semua hal tentang Lampung menjadi baik' dalam makna yang lebih substantif dan berkeadilan.

Media Lokal sebagai Agen Hegemoni

Analisis menunjukkan bahwa Lampung Geh tidak sekadar merefleksikan realitas, tetapi aktif memproduksi realitas hegemonik yang melayani kepentingan elite politik-ekonomi. Hegemoni, dalam konsepsi Gramsci, adalah proses di mana kelompok dominan mempertahankan kekuasaan bukan melalui kekerasan, melainkan melalui konsensus dan kepatuhan ideologis yang dibentuk secara kultural. Media massa berfungsi sebagai aparatus kultural yang menyebarkan nilai-nilai dan gagasan kelompok dominan, membentuk "common sense" masyarakat sehingga tatanan sosial yang timpang diterima sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah.

Dalam konteks pemberitaan kereta gantung, hegemoni media bekerja melalui tiga mekanisme simultan. Pertama, naturalisasi ideologi dominan: pembangunanisme dan teknokratisme disajikan sebagai satu-satunya cara berpikir yang rasional tentang pembangunan daerah. Diksi seperti "solusi kemacetan," "pendorong pariwisata," dan "tidak membebani APBD" diulang-ulang hingga menciptakan kesan bahwa proyek ini adalah keputusan yang tak terelakkan dan menguntungkan semua pihak. Publik tidak diberi ruang untuk mempertanyakan: apakah ini benar-benar solusi terbaik? Siapa yang paling diuntungkan? Apa alternatifnya?

Kedua, marginalisasi wacana alternatif: perspektif kritis yang mempertanyakan urgensi proyek, risiko ketergantungan pada modal asing, dampak lingkungan, transparansi kontrak, dan hak partisipasi masyarakat—semuanya absen dalam pemberitaan. Absennya suara kritis ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari

kebijakan redaksional yang dipengaruhi oleh relasi patronase media-pemerintah. Dengan menyingkirkan perspektif alternatif, media menciptakan ilusi bahwa tidak ada perdebatan, tidak ada kontroversi, tidak ada yang perlu dipertanyakan—semua sudah jelas dan baik.

Ketiga, legitimasi kekuasaan elite: pemerintah dan investor asing dikonstruksi sebagai aktor visioner yang membawa kemajuan, sementara masyarakat diposisikan sebagai penerima manfaat pasif. Struktur kalimat yang menempatkan Gubernur sebagai subjek aktif ("Gubernur meresmikan," "Pemprov menggandeng") meneguhkan otoritas dan kebijaksanaan pemerintah. Investor asing dibingkai sebagai "mitra" yang murah hati, bukan sebagai aktor ekonomi yang mengejar keuntungan. Konstruksi ini membentuk kesadaran publik yang patuh dan bersyukur, bukan kritis dan partisipatif.

Hegemoni media ini bekerja secara halus namun efektif. Publik tidak merasa dipaksa untuk mendukung proyek, tetapi "secara sukarela" menerima narasi pembangunan karena alternatif lain tidak pernah dihadirkan. Ini adalah kekuatan hegemoni: menciptakan konsensus tanpa paksaan, membentuk "akal sehat" yang menguntungkan kelompok dominan (Hall, 1982) menegaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi makna yang menguntungkan struktur kekuasaan. Dalam kasus Lampung Geh, media lokal menjadi alat intelektual penguasa untuk mempertahankan kekuasaan melalui kendali atas wacana publik—tanpa sensor terang-terangan, tanpa kekerasan, tetapi dengan konstruksi wacana yang sistematis dan hegemonik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media lokal Lampung Geh mengkonstruksi realitas pembangunan kereta gantung di Bandar Lampung secara hegemonik. Melalui strategi wacana pada level teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, media secara konsisten memposisikan pemerintah sebagai aktor visioner, investor asing sebagai penyelamat, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif. Konstruksi wacana didominasi oleh ideologi pembangunanisme dan teknokratisme yang bekerja simultan untuk menutup ruang kritik terhadap risiko sosial, transparansi kontrak, dan ketergantungan modal asing.

Evaluasi berdasarkan prinsip komunikasi Islam mengungkap adanya jarak antara praktik aktual dengan nilai-nilai amanah, tabayyun, dan maslahah. Temuan ini bukan dimaksudkan sebagai penghakiman, melainkan refleksi konstruktif yang dapat menjadi titik tolak perbaikan menuju praktik jurnalisme yang lebih independen dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Media saat ini berfungsi lebih sebagai instrumen legitimasi politik pembangunan daripada ruang publik kritis. Meski demikian, kesadaran kritis yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi katalis bagi transformasi praktik jurnalisme lokal.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian analisis wacana kritis dan komunikasi pembangunan melalui tiga aspek: mengungkap mekanisme relasi

patronase media lokal-pemerintah daerah, mengintegrasikan perspektif komunikasi Islam (amanah, tabayyun, maslahah) sebagai kerangka etis evaluatif—sebuah inovasi metodologis dalam kajian media lokal di daerah mayoritas Muslim, dan memberikan basis empiris bagi pengembangan literasi media kritis yang memberdayakan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.

Keterbatasan penelitian terletak pada fokus terhadap empat berita dari satu media. Penelitian lanjutan dapat memperluas objek kajian ke media lokal lain, membandingkan konstruksi wacana media lokal dan nasional, mengkaji resepsi audiens, atau melakukan etnografi media untuk menggali proses produksi berita dan relasi kuasa antara jurnalis, redaksi, dan pemerintah daerah.

Implikasi praktis penelitian mencakup tiga arah: bagi praktisi media, urgensi penguatan independensi editorial dan fungsi pengawasan kritis dengan mengintegrasikan nilai-nilai komunikasi Islam; bagi pemerintah, pentingnya transparansi proaktif dan partisipasi publik substantif dalam pembangunan; bagi masyarakat, literasi media kritis sebagai kunci untuk tidak terperangkap dalam narasi tunggal yang menguntungkan kelompok dominan. Penelitian ini diharapkan menjadi katalis bagi transformasi ekosistem media lokal menuju praktik jurnalisme yang lebih independen, kritis, dan melayani kepentingan publik.

REFERENSI

- Adiprasetio, J. (2025). Journalism Studies in the Shadow of Authoritarianism: The Genealogy of the Shallowness of Indonesian Journalism Scholarship and Research. *Journalism History*, 00(00), 1–25. <https://doi.org/10.1080/00947679.2025.2515931>
- Arifin, A. K., & Basuki, U. (2018). Media dan NYIA : Analisis wacana kritis pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport dalam pemberitaan media lokal di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 67–80. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art5>
- Eriyanto. (2021). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media (edisi revisi)*. LKis.
- Fairclough, N. (2018). CDA as dialectical reasoning. In J. Flowerdew & J. E. Richardson (Eds.), *The Routledge handbook of critical discourse studies* (pp. 13–25). Routledge.
- Hall, S. (1982). The rediscovery of ideology: Return of the repressed in media studies. In M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, & J. Woollacott (Eds.), *Culture, society and the media* (pp. 56–90).
- Hameleers, M. (2021). Prospect or threat? A comparative, experimental study of the effects of populist communication on political participation. *Political Communication*, 38(5), 534–557.
- Hart, C., Cap, P., & Dancygier, B. (2020). Critical Discourse Analysis. In *The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics* (pp. 259–273). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316339732.024>
- Haryatmoko. (2019). *Critical discourse analysis: Landasan teori, metodologi dan penerapan*. RajaGrafindo Persada.
- Krzyżanowski, M. (2020). Discursive shifts and the normalisation of racism: imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism. *Social Semiotics*, 30(4), 503–527. <https://doi.org/10.1080/10350330.2020.1766199>
- Lim, M. (2021). Roots, routes and routers: Communications and media of contemporary social movements. *Journalism & Communication Monographs*, 23(2), 92–136.
- Machin, D., & Mayr, A. (2021). Multimodality and critical discourse analysis. *Linguistics Vanguard*, 7(1).
- Nielsen, R. K. (2015). *Local journalism: The decline of newspapers and the rise of digital media*. I.B. Tauris.
- Nugroho, Y. (2020). Media and power in Indonesia: The post-authoritarian era. *South East Asia Research*, 28(1), 24–41.
- Oktavia, A. R., & Nasution, N. A. (2023). Understanding Islamic symbols in Ramadhan special advertisements: A discourse analysis. *Komunike: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 15(2), 119–140. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v15i2.8864>
- Richardson, J. E. (2019). *British Muslims in the broadsheet press: A critical discourse analysis*. Palgrave Macmillan.

- Suryani, W., Kango, A., & Akifah, A. (2023). Constructing Trust in Media Through Islamic Values : Countering Hoaxes and Disinformation Membangun Kepercayaan terhadap Media Melalui Nilai-Nilai Islam : Melawan Hoaks dan Disinformasi. *Al-Ulum*, 23(1), 21–39.
- van Dijk, T. A. (2018). *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*. Cambridge University Press.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2023). *Methods of critical discourse studies*. SAGE Publications.
- Yumni, A., Bakar, A., Fazial, F., Abdullah, R., Husna, N., Taher, M., Hidayah, N., & Hamid, S. A. (2024). The Concept of Tabayyun in Dissemination of Information Through Mass Media. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 14(1), 2630–2642. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i1/20693>
- Yuliana, S. (2025). *Pemkot akan bangun flyover lagi dan kereta gantung di Bandar Lampung*. <Https://Kumparan.Com/Lampung.geh/Pemkot-Akan-Bangun-Flyover-Lagi-Dan-Kereta-Gantung-Di-Bandar-Lampung-24W7T7YM6h7>.